

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang menganut paham demokrasi, di dalam sistem politiknya. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman pendapat, aspirasi, kepentingan politik dan sebagainya. Negara Indonesia sebagai negara multikultural yang di dalamnya terdapat berbagai kehidupan manusia yang memiliki suatu perbedaan baik dari agama, ras, bahasa, dan etnis akan menciptakan sebuah harmonisasi kultural yang beragam. Harmonisasi kultural yang nampak dalam sistem perpolitikan di Indonesia yakni munculnya nama-nama kelompok minoritas dari etnis Tionghoa dalam berpolitik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sikap dan perilaku kelompok masyarakat etnis Tionghoa dalam memberikan dukungan kepada calon kandidatnya dari etnis Tionghoa dalam pemilihan umum di Indonesia.

Negara Indonesia yang memiliki sebagian wilayahnya terpisah-pisah mampu menunjukkan bahwa masyarakatnya mampu menjaga suatu keberagaman dan tetap selalu menjunjung tinggi persatuan seperti yang telah tercantum dalam sila ketiga Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, begitu juga halnya dengan konsep demokrasi yang selalu dijunjung tinggi oleh bangsa khususnya dalam hak berpolitik bagi setiap warga negara. Selain

dikenal sebagai negara multikultural, Indonesia juga terkenal dengan negara multi-etnis (Syaukani, 2005: 21).

Berdasarkan data pusat statistik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis dengan persentase pada sensus Tahun 2013 yakni etnis Jawa 41,7%, etnis Sunda 15,4%, etnis Tionghoa 3,7%, etnis Melayu 3,4%, etnis Madura 3,3%, etnis Batak 3%, etnis Minang 2,7%, etnis Betawi 2,5%, etnis Bugis 2,5%, etnis Arab Indonesia 2,4%, etnis Banten 2,1%, etnis Bali 1,5%, etnis Makasar 1,3%, etnis Cirebon 0,9%, etnis Lampung 0,5% dan etnis Sasak 0,4% yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia (<http://wikipedia.org/data-statistik.php> diakses pada 2 Februari 2014, 11.30 WIB).

Menurut Data KPU Indonesia populasi etnis Tionghoa yang tinggal dan menetap di Indonesia pada Tahun 2013 sudah mencapai 9 juta jiwa atau sekitar 3,7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hasil sensus populasi Tionghoa Tahun 2012 baru sekitar 8 juta jiwa atau 2,8% dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia Tionghoa naik sekitar 0,9% sampai 1,04% (<http://data.kpu.go.id/dpt.php> diakses pada 10 Februari 2014, 14.45 WIB).

Etnis Tionghoa dalam sejarah kehidupannya di Indonesia pernah mempunyai kenangan buruk, salah satunya Peristiwa Mei 1998. Pada saat itu banyak etnis Tionghoa yang mengalami kekerasan baik fisik dan psikis, pengekangan kebebasan di bidang politik, bahkan penjarahan barang secara besar-besaran.

Peristiwa tersebut dilatarbelakangi dengan adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan adanya kecemburuan sosial antara pribumi kepada etnis Tionghoa yang dilibatkan dalam kebijakan pemerintah yakni pembangunan ekonomi moneter yang membuat kehidupan pribumi semakin menurun (<http://anri-wikipedia/dpt.php/tragedi-semanggi> diakses pada 19 Februari 2014, 20.30 WIB).

Pasca orde baru, muncul beberapa Perundang-undangan baru untuk mencabut peraturan diskriminatif kepada etnis Tionghoa salah satunya adalah Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang ditetapkannya hari tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Era reformasi, etnis Tionghoa mulai menyerukan isu-isu lokal tentang penegakan HAM dan juga mulai masuk dan terlibat dalam kehidupan politik Indonesia salah satunya dengan sikap atau perilaku kelompok minoritas etnis Tionghoa dalam mengapresiasi perwakilannya sebagai kandidat pemilihan umum (Hoon, 2012:19).

Bentuk perilaku dan aspirasi yang ditunjukkan etnis Tionghoa mulanya masih pada taraf ikut berpartisipasi dengan memilih anggota legislatif dan Presiden dalam pemilihan umum. Perkembangan selanjutnya perilaku politik yang ditunjukkan etnis Tionghoa di Indonesia mulai terlihat dengan memberikan dukungan terhadap kandidat yang berasal dari etnis Tionghoa dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, terlihat banyak warga keturunan Tionghoa yang mendukung kandidatnya sebagai wakil rakyat, anggota pemerintahan, dan menteri-menteri dalam Kabinet pemerintahan era Reformasi.

Pemilih etnis Tionghoa itu sendiri menjadi suatu partisipasi politik dan mulai menunjukkan pilihan-pilihan politik yang sesuai dengan ideologinya sebagai kelompok minoritas. Pemilu 1999 tercatat 150 calon anggota legislatif dari etnis Tionghoa, Pemilu 2004 jumlahnya meningkat menjadi 200 caleg dari etnis Tionghoa, dan pada Pemilu 2009 jumlahnya 100 calon legislatif. Era reformasi saat ini juga banyak partai politik yang bermunculan milik etnis Tionghoa seperti Partai Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembaharuan Indonesia (Parpindo), Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI) ([http:// www. kpu. go. id/index.php](http://www.kpu.go.id/index.php) diakses pada 3 Februari 2014, 20.25 WIB).

Etnis Tionghoa pada dasarnya masih mendominasi sektor perekonomian bisnis di Indonesia, kelompok etnis Tionghoa juga mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Konsep perilaku para pemilih etnis Tionghoa hakikatnya untuk mewujudkan dan meningkatkan standar hidup bangsa yang mencerminkan sifat kapitalisme dan materialisme yang dimiliki kandidat etnis Tionghoa dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Politisi etnis Tionghoa yang pernah menduduki jabatan di pemerintahan, baik pusat maupun daerah seperti Kwik Kian Gie, Alvin Lee, dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Marie Elka Pangestu.

Politisi yang berasal dari etnis Tionghoa tidak terlepas dari bentuk sikap atau perilaku kelompok masyarakat etnis Tionghoa dalam memberikan dukungan terhadap Politisi etnis Tionghoa. Salah satu contoh bentuk dukungan politik yang diberikan oleh pemilih kepada Kwik Kian Gie adalah munculnya ikatan

pengusaha Indonesia yang pada umumnya berbasis etnis Tionghoa. Kwik Kian Gie merupakan politisi etnis Tionghoa di samping sebagai seorang fungsionaris pemerintahan, Kwik mendirikan PT. *Indonesian Financing & Investment Company* yang dikelola oleh persatuan etnis Tionghoa Indonesia (<http://uob.bank.go.id/financial-bussiness/index.php> diakses pada 11 Februari 2014, 13.30 WIB).

Contoh lain adalah terpilihnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, merupakan cerminan bahwa pemilih dalam hal ini adalah masyarakat DKI Jakarta memberikan dukungan bukan hanya dari kelompok etnis Tionghoa saja melainkan dari warga DKI Jakarta non etnis Tionghoa. Kepemimpinan yang tegas dan ulet, dan pekerja keras terbukti dengan kinerjanya saat ini yang lebih menekankan suatu perubahan yang lebih baik bagi DKI Jakarta (Suryadinata, 2012: 31).

Perilaku pemilih terhadap kandidat etnis Tionghoa yang dinamis dan asertif dalam partisipasi berpolitik adalah pada pemilu 2004 dan 2009, pada saat pesta demokrasi berlangsung, banyak masyarakat Tionghoa yang berpartisipasi menjadi anggota legislatif, salah satu contoh bentuk perilaku positif masyarakat terhadap kandidat etnis Tionghoa di Provinsi Lampung yakni terpilihnya salah satu warga keturunan etnis Tionghoa bernama Effendi Taslim dan Mungliana sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Metro pada Pemilu 2004. Melihat sikap masyarakat yang cukup positif dalam memilih kandidat etnis Tionghoa di Provinsi Lampung maka pada pemilihan berikutnya di Tahun 2009 calon legislatif keturunan etnis Tionghoa

atas nama Hartarto Lojaya dan Donny Irawan mencalonkan sebagai anggota legislatif daerah pemilihan 1 Kota Metro Pusat yang kemudian mendaftarkan diri pada pemilihan legislatif Tahun 2009 di Kota Metro.

Kandidat etnis Tionghoa pada pemilihan legislatif Tahun 2014 lebih cenderung mencalonkan diri di wilayah Kota Metro karena dinilai bahwa Kota Metro merupakan basis utama persatuan seluruh marga Tionghoa seperti persatuan marga Han, Wen, Liong, Thien, Juan, Le, Chaw dan sebagainya sehingga pemilih etnis Tionghoa dapat bergabung dalam mendulang suara. Kota Metro juga merupakan tempat Dewan Perwakilan Cabang Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (DPC PSMTI) di Kota Metro, sehingga berbagai masyarakat etnis Tionghoa dari berbagai daerah di Lampung sering mengadakan pertemuan di DPC PSMTI yang bertempat di Aula Hati Kudus Kota Metro. Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 172.985 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah etnis Tionghoa di Kota Metro 6.040 jiwa (Profil Kota Metro 2014).

Beragamnya etnis di Kota Metro menyebabkan keragam pula adat dan kebiasaan masyarakat. Beberapa etnis memiliki perkumpulan tertentu yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan seperti etnis Sumatera Barat dengan istilah Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB), etnis Jawa dengan Keluarga Banyumas yang menggunakan istilah penginyongan dan etnis Tionghoa dengan istilah Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) atau dalam bahasa *Hokkien* (bahasa mandarin) dikenal dengan *Lan*

Fo. Berdasarkan data pusat statistik Kota Metro Tahun 2014 kondisi keagamaan yang dianut berbagai masyarakat dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Keagamaan Pemerintah Kota Metro Tahun 2014

No	Variabel	Jumlah	No	Variabel	Jumlah
1	Penduduk		2	Tempat Ibadah	
	A. Islam	158.846		A. Mesjid/Musholla	336
	B. Protestan	4.471		B. Gereja Kristen	13
	C. Katolik	1.458		C. Gereja Katolik	6
	D. Hindu	353		D. Pura	2
	E. Budha	4.051		E. Vihara	5
	F. Khonghucu	3.806		F. Klenteng	2
	Total	172.985		Total	364

Sumber: Profil Kota Metro 2014

Masyarakat kelompok etnis Tionghoa pada umumnya menganut agama Konghucu, Budha dan Protestan. Kota Metro sebagai Kota Madya kedua setelah Bandar Lampung menjadi tempat yang subur untuk melihat sejauh mana perkembangan kehidupan politik dan bisnis. Pemilu 2004 dan 2009 etnis Tionghoa mulai menampakkan dirinya dalam perpolitikan di Kota Metro, baik sebagai anggota perwakilan rakyat, aktifis politik, maupun pakar politik.

Fenomena di Tahun 2014 cukup berbeda dengan pemilu legislatif sebelumnya, hal ini terlihat dari kelompok masyarakat etnis Tionghoa di Kota Metro cenderung kurang memberikan respon positif terhadap calon anggota legislatif etnis Tionghoa Kota Metro yakni Melany Filiang (Mey Liang) dan Hernany (Tiung Mei Ni). Perilaku pemilih dalam menyikapi berbagai kebijakan atau program calon anggota legislatif etnis Tionghoa Kota Metro yakni Melany Filiang (Mey Liang) dan Hernany (Tiung Mei Ni) kurang begitu terlihat antusias dibandingkan dengan pemilu legislatif sebelumnya. Calon anggota

legislatif etnis Tionghoa pada pemilu legislatif tidak berhasil lolos dalam pemilu 2014. Perilaku pemilih etnis Tionghoa pada pemilu legislatif Tahun 2014 perlu dikaji secara mendalam, hal ini karena Kota Metro sebagai basis utama persatuan seluruh marga Tionghoa dan juga merupakan tempat DPC PSMTI di Kota Metro, serta beberapa kali telah melahirkan kandidat legislatif DPRD Kota Metro pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, namun di Tahun 2014 perilaku pemilih etnis Tionghoa justru kurang memberikan dukungan kepada kandidat etnis Tionghoa.

Melihat perilaku masyarakat etnis Tionghoa di Kota Metro tersebut yang kemudian mendorong peneliti untuk mengkaji mengenai perilaku pemilih etnis Tionghoa dalam pemilihan anggota legislatif Tahun 2014. Kecenderungan pemilih dalam menetapkan pilihannya dapat dilihat dari perilaku pemilihnya. Perilaku pemilih adalah keterkaitan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih atau disebut teori *voting behavioral*. Ketiga faktor tersebut digunakan sebagai pendekatan kepada perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya, namun faktor mana yang paling dominan mempengaruhi perilaku pemilih dalam sebuah Pemilihan calon legislatif masih menjadi perdebatan (Kristiadi, 2006: 22).

Berbagai fakta di atas menjadi bahan yang unik untuk dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Alasan peneliti ingin meneliti tentang Perilaku Pemilih etnis Tionghoa adalah mengkaji lebih dalam mengenai perilaku pemilih etnis tionghoa dalam pemilihan umum Tahun 2014 di Kota Metro. Hal ini

berhubungan dengan sikap atau perilaku yang dimiliki etnis Tionghoa dalam menggunakan hak politiknya serta sikap yang diambil dalam menentukan pilihan dan memberikan dukungan terhadap kandidat etnis Tionghoa.

Alasan kedua yakni, banyaknya pilihan-pilihan politik tetapi mayoritas etnis Tionghoa yang lebih cenderung pada partai-partai yang mempunyai paham Nasionalis. Pada hakikatnya etnis Tionghoa sudah memiliki partai yang mewadahi aspirasi politik etnis Tionghoa, seperti Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI) dan partai yang bernafaskan agama yang dianut sebagian besar elit politik etnis Tionghoa di Indonesia, seperti Partai Kristen Indonesia. Alasan ketiga adalah ingin mengetahui pendekatan perilaku pemilih etnis Tionghoa dalam Pemilu 2014 di Kota Metro karena dinilai bahwa Kota Metro merupakan basis utama persatuan seluruh marga Tionghoa.

Peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan objek penelitian peneliti. Merujuk pada hasil kegiatan pra penelitian, peneliti menemukan informasi bahwa ada peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian pada Persatuan Etnis Tionghoa di Sumatera Selatan dalam waktu Tahun 2009 dengan topik atau objek penelitian yang hampir relevan sebagaimana yang peneliti uraikan di bawah ini. Hasil penelitian itu peneliti jadikan sebagai rujukan untuk menambah referensi dan memperkaya analisis. Berikut ini adalah hasil penelitian sebelumnya pada penelitian Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya oleh Yusfirlana Nuri Ma'rifah mengenai "Orientasi Perilaku Pemilih Politisi Etnis Tionghoa Di Kota Palembang Pada Pemilu 2009". Penelitian ini menggunakan satu

variabel yaitu, orientasi perilaku pemilih politisi etnis Tionghoa dengan indikatornya yaitu pendekatan domain kognitif yang meliputi isu dan kebijakan publik, citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa mutakhir, peristiwa personal, dan faktor epidemik.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan Yusfirlana Nuri Ma'rifah menemukan fakta bahwa, dalam orientasi perilaku pemilih politisi etnis Tionghoa di Kota Palembang pada Pemilu 2009 diperoleh gambaran bahwa dalam pendekatan domain kognitif mampu mengkaji lebih dalam mengenai perilaku pemilih dalam proses Pemilu Legislatif Tahun 2009 sehingga kelompok etnis Tionghoa yang berada di tengah-tengah mayoritas etnis non Tionghoa mampu berorientasi kepada perilaku pemilih dalam mendulang suara dengan terpilihnya calon-calon anggota legislatif etnis Tionghoa.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus penelitian perilaku pemilih etnis Tionghoa dalam pemilihan umum Tahun 2014 di Kota Metro sedangkan pada peneliti sebelumnya fokus penelitian pada orientasi perilaku pemilih politisi etnis Tionghoa di Kota Palembang pada Pemilu 2009, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada teori perilaku pemilih dengan pendekatan domain kognitif. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai perilaku pemilih masyarakat berdasarkan etnisitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Metro, yang pada kenyataannya kelompok minoritas kecil kemungkinan dapat dipilih dalam suatu pemilihan legislatif di tengah-tengah kelompok mayoritas,

namun pada dasarnya etnis Tionghoa memiliki hak yang sama baik dalam berpendapat, beraspirasi dan berpolitik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah perilaku pemilih etnis Tionghoa, sehingga peneliti menganggap perlu diadakan penelitian mengenai “Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Metro”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perilaku pemilih etnis tionghoa dalam pemilihan umum Tahun 2014 di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih etnis tionghoa dalam pemilihan umum Tahun 2014 di Kota Metro.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dalam perilaku pemilih etnis tionghoa dalam pemilihan umum Tahun 2014 di Kota Metro.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi etnis Tionghoa di Kota Metro khususnya para calon anggota legislatif etnis Tionghoa di Kota Metro dalam pendekatan kepada perilaku pemilih.